

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia bisa dikatakan tidak terlepas dari adanya pengaruh globalisasi. Dengan adanya arus globalisasi yang juga diiringi dengan semakin terbentuknya *willingness* atau keinginan para kelompok LGBT untuk menyuarakan keberadaannya dan mendapatkan hak sebagai masyarakat, bahkan sebagai “manusia” agar dapat diterima di masyarakat luas. Hal yang sedemikian tidak hanya terjadi di negara barat seperti Amerika Serikat yang telah mejunjung tinggi asas kebebasan dan nilai-nilai liberal¹ sebagaimana yang telah diketahui selama ini.² Di negara Indonesia sendiri adanya kelompok LGBT juga semakin giat dan berani menampakkan keberadaan mereka, hal yang sama dilakukan oleh kelompok LGBT yang berada di Indonesia memiliki tujuan yang ingin dicapai adalah adanya penerimaan terhadap kelompok tersebut oleh masyarakat.³

Dalam bukunya yang berjudul *The Gay Archipelago*, Tom Boellstorff, mengatakan bahwa keberadaan kelompok LGBT di Indonesia merupakan bagian dari negara kesatuan Indonesia. Kelompok LGBT di Indonesia telah lama hadir dan terus melakukan aktivitasnya dengan jangkauan wilayah yang tersebar dari

¹ Penegrtian liberal menurut Jackson dan Sorensen bahwa pandangan liberal terhadap manusia, mengedepankan kebebasan ndividu yang bertujuan untuk kemajuan bagi keuntungan semua pihak. Jackson and Sorensen G., Pengantar Studi Hubungan Internasional. 1999. Hal 140

² Tom Boellstorff, *The Gay Archipelago, Sexuality and Nation in Indonesia* (New Jersey: Pricento University Press, 2005). Hal 8

³ *Ibid.* Hal 9

Sabang sampai Merauke.⁴ Dalam keberagaman budaya Indonesia, pertunjukan pentas seni dan bela diri tidak jarang memperlihatkan penampilan laki-laki berpenampilan perempuan, tetapi tidak jarang juga kemaskulinan digabungkan dengan kesan feminim.⁵ Selain itu dalam beberapa kepercayaan adat di Indonesia meyakini keberadaan dewa interseks⁶ sehingga sebagian orang Indonesia mampu mentolerir keberadaan kaum transgender itu sendiri.⁷

Perilaku seksual dan identitas gender yang beragam telah dikenal dan ada di Indonesia sejak zaman dahulu, hanya saja keberadaan homoseksual baru mulai bermunculan di sebagian kota besar di Indonesia dan mulai berkembang pada akhir tahun 1960-an. Perkembangan kelompok LGBT di Indonesia saat itu mulai nampak dengan adanya organisasi pertama yang dibawahi oleh kelompok kelompok wanita *transgender*.⁸ Tom Boellstorff juga menyebutkan bahwa jumlah kelompok LGBT di Indonesia sangatlah banyak bahkan bisa diperkirakan sebanyak 2 persen dari penduduk Indonesia.⁹ Namun karena mayoritas masyarakat Indonesia yang termasuk dalam kelompok LGBT lebih menutup diri dan menyembunyikan identitasnya, sehingga jumlah dalam angka yang pasti belum diketahui secara spesifik.

⁴ Tom Boellstorff, *The Gay Archipelago, Sexuality and Nation in Indonesia* (New Jersey: Princeton University Press, 2005). Hal 8

⁵ USAID dan UNDP report, "HIDUP SEBAGAI LGBT di Asia: Laporan Nasional Indonesia," (2013) hal 18

⁶ Interseks merupakan keadaan manusia yang tidak dapat diidentifikasi seksualnya, hal ini dapat diketahui dari perbedaan kelamin dengan struktur tubuh yang dimiliki sejak lahir oleh individu tersebut, *Kajian Seksualitas kritis, Jurnal gandrung Vol.1 No.2, Gaya Nusantara*. 2010

⁷ USAID dan UNDP report, *HIDUP SEBAGAI LGBT di Asia*. Hal 18

⁸ *Ibid.* Hal 18

⁹ Tom Boellstorff, *The Gay Archipelago, Sexuality and Nation in Indonesia* (New Jersey: Princeton University Press, 2005). Hal 7

Sulitnya mengidentifikasi jumlah pasti kelompok LGBT dikarenakan masyarakat Indonesia sendiri sulit dalam menerima adanya kelompok tersebut.¹⁰ Sedangkan menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian kesehatan pada tahun 2006 menunjukkan jumlah LGBT di Indonesia mencapai kurang lebih 760 ribu orang.¹¹ Gaya Nusantara (GN), sebagai salah satu komunitas kelompok LGBT terbesar di Indonesia mengatakan bahwa menurut survey yang dilakukan oleh GN, jumlah LGBT di Indonesia mencapai 2 persen dari penduduk Indonesia.¹² Menurut Tom Boellstorff, kelompok LGBT di Indonesia mulai serentak menunjukkan identitas mereka sebagai kaum gay dan lesbian sejak era tahun 1970-an dan terus berkembang dengan diiringi adanya globalisasi.¹³

Selanjutnya pada tahun 1980-an dilakukan mobilisasi terhadap kelompok gay dan lesbian yang pada saat itu pengorganisasian dilakukan melalui peran media, penyebaran informasi melalui media cetak ini akhirnya berhasil membentuk kelompok kecil di seluruh Indonesia.¹⁴ Kegiatan ini akhirnya mendapatkan dukungan dari beberapa kalangan karena pada tahun 1990-an HIV mulai tersebar sehingga diharapkan dengan terorganisasinya kelompok LGBT bisa memberikan pandangan yang lebih baik terhadap aktifitas kelompok LGBT di Indonesia.¹⁵ Seiring berjalannya waktu, perkembangan kelompok LGBT di Indonesia mulai

¹⁰ USAID dan UNDP report, "HIDUP SEBAGAI LGBT di Asia: Laporan Nasional Indonesia," (Bali 2013) hal 35

¹¹ Indonesia. Departemen Kesehatan, "Situasi HIV dan AIDS Indonesia th.1987-2006," <http://www.depkes.go.id/folder/view/01/structure-publikasi-pusdatin-lain-lain.html>. (diakses 2 maret 2017)

¹² GAYa NUSANTARA. Encourage people to be proud of their sexuality, "Info LGBTIQ," januari 2017, <https://gayanusantara.or.id/info-lgbtig/>. (diakses 2 maret 2017)

¹³ Tom Boellstorff, *The Gay Archipelago, Sexuality and Nation in Indonesia* (New Jersey: Princeton University Press, 2005). Hal 38

¹⁴ USAID dan UNDP report, "HIDUP SEBAGAI LGBT di Asia: Laporan Nasional Indonesia," (Bali 2013) hal 20

¹⁵ *Ibid.* Hal 20

terlihat, kelompok-kelompok yang sudah terbentuk melebarkan aktivitasnya di dunia politik dan pemerintahan. Dalam laporan UNDP dijelaskan bahwa organisasi kelompok LGBT pada saat itu mulai berkerjasama dengan gerakan organisasi feminis, organisasi kesehatan reproduksi, gerakan pro-demokrasi dan HAM.¹⁶

Dalam lingkup global, pembentukan gerakan kelompok LGBT secara besar-besaran untuk mendapatkan kesetaraan dilakukan dalam skala yang besar dengan keanggotaan 80 negara.¹⁷ Adanya diskriminasi dan kekerasan di berbagai negara membuat beberapa kalangan peduli kesetaraan ini mulai menyuarakan keberadaannya. Perubahan yang dilakukan melalui konferensi dan berbagai kampanye yang didokumentasikan untuk disebarluaskan menjadi sebuah ajakan kepada masyarakat global khususnya pelaku LGBT ini yang akhirnya disebut *Out Right*. *Out Right* bertujuan tidak lain adalah untuk menumbuhkan semangat kelompok LGBT dalam memperoleh kesetaraan, kebebasan dan keadilan dalam bermasyarakat.¹⁸

Banyaknya keikutsertaan negara dalam pembentukan gerakan pembela kelompok LGBT semakin membuka peluang dan pengaruh bagi negara lain tidak terkecuali Indonesia. Diskriminasi yang dilakukan terhadap LGBT di setiap negara membuat kelompok LGBT berjuang menyuarakan keinginannya sebagai manusia untuk diperlakukan setara dengan individu lainnya. Akhirnya gerakan yang dilakukan selama lebih dari 20 tahun ini mendapat kejelasan dengan terbentuknya

¹⁶ USAID dan UNDP report, "HIDUP SEBAGAI LGBT di Asia: Laporan Nasional Indonesia," (Bali 2013) hal 22

¹⁷ United State. OutRight Action International, "International Gay and Lesbian Human Rights Commission," 2015, <https://www.outrightinternational.org/how-we-work>. (diakses 2 maret 2017)

¹⁸ *Ibid*.

International Gay Lesbians Human Right Commission pada tahun 1990.¹⁹ Organisasi Internasional yang berfokus pada pembelaan hak-hak kelompok LGBT dan juga memonitori kondisi Hak Asasi Manusia. Dengan terbentuknya organisasi ini pula fenomena *global queering* terjadi.²⁰

Di Indonesia, gerakan kelompok LGBT menunjukkan keberhasilannya dalam mengembangkan diri tepatnya dimulai pada tahun 1998. Adanya perubahan sistem politik Indonesia dari pemerintahan otoriter ke pemerintahan demokrasi membawa peluang terhadap gerakan LGBT di Indonesia. Di negara Indonesia, perencanaan terhadap pengorganisasian LGBT menjadi lebih kuat dalam jangkauan nasional dengan adanya pendanaan secara formal terhadap program ini. Selain itu, adanya wacana keterlibatan HAM untuk melakukan advokasi di tingkat nasional dengan adanya berbagai agenda kegiatan organisasi LGBT yang akan dilaksanakan, serta organisasi-organisasi pendukung lain yang mulai bermunculan, menjadikan sosial mulai menerima keadaan kelompok LGBT serta konferensi nasional mulai dilaksanakan.²¹

Berkembangnya gerakan dan aktifitas kelompok LGBT di Indonesia tidak terlepas dari peran globalisasi. Adanya perkembangan dari berbagai aspek turut mengubah dan membawa pergerakan kelompok LGBT ke arah yang lebih berkembang. Peter A. Jackson mengungkapkan, berkembangnya pasar yang membawa perkembangan pula terhadap penyebaran informasi dan ideologi

¹⁹ United State. OutRight Action International, "International Gay and Lesbian Human Rights Commission," 2015, <https://www.outrightinternational.org/how-we-work>. (diakses 13 maret 2017)

²⁰ *Ibid.*

²¹ Kabar LGBT. KORANNYA KOMUNITAS LGBT INDONESIA, "Sejarah dan perkembangan LGBT di Indonesia," Januari 2016, <https://kabarlgbt.org/2016/01/11/it-gets-better-ini-akan-menjadi-lebih-baik/>. (diakses 23 maret 2017)

budaya antar negara sehingga membuat keberadaan kelompok LGBT ini mulai diterima oleh masyarakat.²² Selanjutnya, menurut Peter A. Jackson fenomena global yang melibatkan berkembangnya eksistensi kelompok LGBT ini disebut sebagai *global queering* dengan pembentukan *International Gay and Lesbian Human Right Commission* pada tahun 1990.²³

Dalam artikelnya yang berjudul *Capitalism and Global Queering National Markets, Parallels Among Sexual Cultures, and Multiple Queer Modernities*, Peter A. Jackson menjelaskan bahwa sejak awal tahun 1990-an fenomena homoseksual memiliki pertumbuhan dan perkembangan secara pesat. Perkembangan yang terjadi secara global ini dihasilkan oleh adanya globalisasi yang mengakibatkan berubahnya pola pikir manusia yang tidak hanya terjadi pada negara maju seperti Amerika tetapi juga negara yang menganut budaya ketimuran seperti Indonesia.²⁴ Dalam artikel tersebut, Plummer juga menyatakan bahwa di era globalisasi saat ini terdapat berbagai elemen yang bisa diidentifikasi sebagai berlangsungnya globalisasi. Elemen tersebut di antaranya seperti gerakan LGBT, perkembangan politik dan budaya, serta sistem informasi yang semakin tidak mengenal lintas batas antarnegara.²⁵

Dalam buku yang berjudul *The Gay Archipelago* karya Tom Boellstorff, Dede Oetomo selaku pendiri organisasi kelompok LGBT terbesar di Indonesia mengatakan bahwa adanya globalisasi menyebabkan mudahnya arus informasi

²² Peter A. Jackson, "Capitalism and *Global Queering* National Markets, Parallels Among Sexual Cultures, and Multiple Queer Modernities," *A journal of lesbian and Gay studies* 15, No. 3 (2009) hal. 6

²³ *Ibid.* Hal. 10

²⁴ *Ibid.* Hal. 2

²⁵ *Ibid.* Hal. 2

antar negara dan memberikan kemudahan akses pengetahuan. Secara spesifik Dede Oetomo menjelaskan media masa dapat membantu individu dalam menemukan informasi terkait kelainan seksual seseorang dan membantu dalam menyuarkan hak kelompok LGBT terhadap masyarakat dan pemerintah secara langsung maupun tidak langsung.²⁶ Selain itu, globalisasi dinilai mampu menciptakan ruang untuk mengembangkan aspek dalam segala bidang sosial, LGBT di Indonesia dengan seiring berjalanya waktu, semakin menunjukkan penerimaan. Selain adanya perkembangan sosial yang menjadikan kelompok LGBT mulai diterima di Indonesia, penerimaan juga hadir karena adanya perubahan sistem politik.²⁷

²⁶ Dede Oetomo, "Gays in Indonesia," *society's attitudes*, (1984): Hal 35

²⁷ *Ibid.* Hal 36

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jabarkan di atas, maka Rumusan Masalah yang digunakan untuk melakukan penelitian lebih lanjut adalah *Pengaruh globalisasi dalam perkembangan perjuangan identitas dan hak kelompok LGBT di Indonesia*

1.3.Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara empiris bagaimana globalisasi yang dibahas dalam penelitian ini yaitu fenomena perkembangan teknologi dalam menyebarkan pengaruhnya mempengaruhi perkembangan gerakan kelompok sosial LGBT di Indonesia tahun (1980-2013).

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini di harapkan nantinya dapat memberikan penjelasan yang kongkrit terkait pengaruh globalisasi dalam perkembangan gerakan sosial kelompok LGBT di Indonesia. Penjelasan yang di hasilkan berupa teori yang dikaitkan dengan data-data mengenai sejarah perkembangan gerakan kelompok LGBT. Hasil penelitian ini juga di harapkan berguna untuk menganalisa pengaruh globalisasi dalam dunia sosial. Penelitian ini juga diharapkan nantinya menjadi dasar penelitian selanjutnya khususnya dalam ilmu Hubungan Internasional.

1.5. Kerangka Pemikiran

1.5.1. Peringkat Analisis

Menurut John T. Rourke peringkat analisis meliputi *individual-level analysis* yaitu pengaruh seseorang sebagai individu atau sebagai spesies dalam membuat kebijakan. *State-level analysis* yaitu bagaimana organisasi dan pengoperasian pemerintah mempengaruhi kebijakan dan *system-level analysis* yaitu realita dan tekanan eksternal yang mempengaruhi kebijakan suatu negara.²⁸

Individual-level Analysis atau analisis level individu dapat dilihat dari pandangan untuk seseorang yang membuat suatu kebijakan. Analisis ini menekankan pada proses pembuatan kebijakan dengan melihat bagaimana seseorang (sebagai spesies, dalam kelompok maupun individual) membuat sebuah keputusan.²⁹

Analisis tingkat negara (*state-level analysis*) mengasumsikan bahwa karena negara adalah pelaku internasional yang paling penting, dunia politik dapat dipahami dengan berfokus pada bagaimana kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh struktur politik negara, para aktor pembuat kebijakan, dan interaksi antara kebijakan para aktor. Kebijakan luar negeri tidak dirumuskan dengan proses pengambilan keputusan tunggal sebaliknya, sifat yang tepat dari proses yang berubah sesuai dengan sejumlah variabel, termasuk jenis sistem politik, jenis situasi, jenis masalah, dan faktor-faktor internal yang terlibat. Negara adalah organisasi yang kompleks, dan internal mereka, atau domestik, dinamikanya

²⁸ John T. Rourke, *Level Of Analysis and Foreign Policy in International Politics On the World stage*, (New York: Palgrave Macmillan, 2009) Ch 3 hal. 65

²⁹ *Ibid.* Hal. 65-78

mempengaruhi tindakan internasional mereka.³⁰ Satu set faktor internal berpusat pada dampak pembuatan kebijakan dari berbagai pelaku pembuatan kebijakan luar negeri dalam hal ini termasuk para pemimpin politik, organisasi birokrasi, legislatif, partai politik dan oposisi, kelompok-kelompok kepentingan, dan masyarakat.

Masing-masing mempengaruhi kebijakan luar negeri ini, tetapi pengaruh mereka bervariasi sesuai dengan jenis pemerintahan, situasi, dan kebijakan yang dipermasalahkan, biasanya kepala pemerintahan adalah yang paling besar sebagai pelaku pembuatan kebijakan luar negeri yang berkuasa birokratis organisasi biasanya aktor paling kuat kedua.³¹ Agar sebuah kebijakan berhasil, negara biasanya harus membuat pilihan-pilihan kebijakan dalam konteks realitas di sistem internasional. Oleh karena itu, analisis sistem tingkat (*system-level analysis*) meneliti bagaimana realitas sistem internasional mempengaruhi kebijakan luar negeri. Banyak faktor yang menentukan sifat sistem tertentu. Faktor sistemik termasuk karakteristik strukturalnya, hubungan kekuasaan, realitas ekonomi, dan norma-norma perilaku.³²

Dalam penelitian kali ini tidak menggunakan *level of analysis*, *level of analysis* digunakan untuk meneliti kebijakan luar negeri yang dipengaruhi oleh faktor tertentu dalam suatu negara, penelitian kali ini membahas mengenai fenomena sosial yang mengglobal karena adanya pengaruh globalisasi.

³⁰ John T. Rourke, *Level Of Analysis and Foreign Policy*, (New York: Palgrave Macmillan, 2009) Ch 3 hal. 79-89

³¹ *Ibid.* Hal. 91-97

³² *Ibid.* Hal. 97

1.5.2. Landasan Teori

1.5.2.1. *Network Society*

Bagi Castells, adanya kemajuan teknologi informasi telah menyediakan wadah dalam interaksi dan perkembangan sosial. Teknologi mampu menyatu dalam masyarakat dan lingkungan sehingga teknologi mampu menghilangkan batas dalam masyarakat. Manuel Castells memiliki banyak pandangan terhadap perkembangan masyarakat informasi. Dua diantaranya adalah mengenai konsep *informasionalisme* dan *network society*.³³

Secara umum, ada enam hal yang menjadi gambaran masyarakat informasi menurut pendapat Manuel Castells tersebut, yakni *informasionalisme*, masyarakat jaringan (*network society*), perekonomian global atau ekonomi informasional, transformasi angkatan kerja, *global city* dan *cyberculture*.³⁴ Menurut Castell, revolusi informasi di Amerika pada tahun 1970-an mengakibatkan terjadinya perubahan luar biasa pada pengelolaan dan peran informasi. Hal ini memunculkan perubahan fundamental pada sistem kapitalis yang disebut sebagai kapitalisme informasional. Sehingga dari perubahan tersebut muncul masyarakat informasi.³⁵

Dengan adanya jaringan (*network*) memungkinkan komunikasi berjalan kesemua arah, pada level struktur manapun, tanpa perlu diwakilkan. Produktivitas dan efisiensi kerja organisasi/ institusi akan semakin berkembang pesat dengan

³³ Manuel Castells, *The Rise of the Network Society*, 2nd. (United Kingdom : John Wiley & Sons, 2002) hal 17

³⁴ Manuel Castells, *The Rise of the Network Society*, 2nd. (United Kingdom : John Wiley & Sons, 2000) hal 17

³⁵ *Ibid.* Hal 17

adanya perkembangan teknologi informasi dan jaringan informasi.³⁶ Dengan begitu perkembangan masyarakat informasi dapat dilakukan ke semua lapisan masyarakat, pada level struktur mana saja, dimanapun dan kapanpun. Jaringan informasi menjadi hal penting karena dengan adanya jaringan setiap individu berhubungan satu sama lain, saling terbuka, mampu berkembang, dinamis, dan mampu bergerak ke arah yang lebih baik.³⁷

Network society digunakan untuk menjelaskan adanya perkembangan suatu individu. Dalam penyebaran informasi terkait adanya perbedaan orientasi seksual yang berlaku dalam masyarakat hal ini sejalan dengan pendapat bapak Dede Oetomo bahwa, masyarakat umumnya mengetahui adanya perbedaan orientasi seksual yang terjadi pada diri mereka melalui informasi di media masa.

³⁶ *Ibid.* Hal 18

³⁷ *Ibid.* Hal 18

1.5.2.2. *Collective action*

Dalam penjelasan tentang *collective action*, Richardson berpendapat bahwa dalam suatu tujuan yang dimiliki oleh seorang individu biasanya akan lebih menguntungkan jika tujuan tersebut dicapai dengan sebuah grup atau kelompok.³⁸ Gerakan kolektif menurut Olson lebih mengarah pada pemikiran secara rasional terhadap suatu individu, Olson berpendapat bahwa dalam mencapai sebuah tujuan, individu cenderung berfikir secara rasional dengan lebih memilih untuk berkerjasama dalam kelompok hal ini dikarenakan minimnya dana yang dikeluarkan dan besarnya kemungkinan pencapaian.³⁹

Collective action dapat menjelaskan bagaimana langkah yang akan diambil oleh individu dalam tindakan-tindakan sosial ataupun politik. Tindakan yang dilakukan biasanya terorganisir dalam kelompok yang memiliki tujuan untuk memenuhi keinginan mereka. *Collective action* menurut Olson dapat dicontohkan seperti gerakan hak sipil yang seringkali kita ketahui seperti adanya upaya penghapusan ketidaksetaraan dan perjuangan untuk mendapatkan pengakuan masyarakat minoritas.⁴⁰

Aksi kolektif global menurut Olson mencakup tiga aspek ukuran kelompok jika semakin banyak anggotanya tentu akan lebih sulit untuk terbentuk dan terkoordinasi. Pendapat yang dikemukakan Olson ini masih berkaitan dengan kepentingan dari masing-masing aktor didalamnya yang dapat menghambat aksi kolektif tersebut. Selanjutnya, komposisi anggota aksi kolektif global setidaknya heterogen meski homogen juga dimungkinkan, cara-cara dalam mengatur aksi

³⁸ Jeremy Richardson, *pressure group*, (Oxford: Oxford university press, 1993)

³⁹ Mancur Olson, *The logic of collective action*, (Cambridge MA : Harvard University Press, 1965)

⁴⁰ *Ibid.* Hal

kolektif untuk menghindari kegagalan dapat dilakukan dengan membentuk federasi internasional atau dengan pemberian insentif.⁴¹

Teori ini dapat membantu menjelaskan adanya keinginan dari individu yang memiliki perbedaan orientasi seksual dalam masyarakat untuk mencari jalan dalam menyuarkan hak-hak yang dimilikinya. *Collective action* mampu menjelaskan bahwa dalam adanya kelompok LGBT menjadikan aksi lebih terorganisir dan sesuai dengan jalanya.

1.5.2.3. *Social action*

Max Weber berpendapat bahwa individu melakukan suatu tindakan berdasarkan atas pengalaman, persepsi, pemahaman dan penafsirannya atas suatu obyek yang menstimulus atau situasi tertentu.⁴² Tindakan individu ini merupakan tindakan sosial yang rasional, yang bertujuan untuk mencapai keinginan atau sasaran dengan sarana-sarana yang paling tepat. Teori Weber dikembangkan lebih lanjut oleh Talcott Parsons, yang mulai dengan mengkritik Weber, menyatakan bahwa aksi atau action itu bukanlah perilaku atau behavior.⁴³ Aksi yang dilakukan oleh individu merupakan tanggapan atau respons terhadap suatu pengaruh sedangkan perilaku merupakan suatu proses mental yang aktif dan kreatif. Menurut Parsons, yang utama bukanlah tindakan individual, melainkan norma-norma dan nilai-nilai sosial yang menuntun dan pengatur perilaku.⁴⁴

Kondisi sosial disatukan dengan komitmen kolektif terhadap suatu nilai akan mengembangkan suatu bentuk tindakan sosial tertentu. Parsons menjelaskan

⁴¹ Mancur Olson, *The logic of collective action*, (Cambridge MA : Harvard University Press, 1965)

⁴² Pip Jones, *PENGANTAR TEORI-TEORI SOSIAL*, trans and ed. Achmad Fedyani Saifuddin (Jakarta : YAYASAN OBOR INDONESIA, 2009) hal 114

⁴³ *Ibid.* Hal 114

⁴⁴ *Ibid.* Hal 114

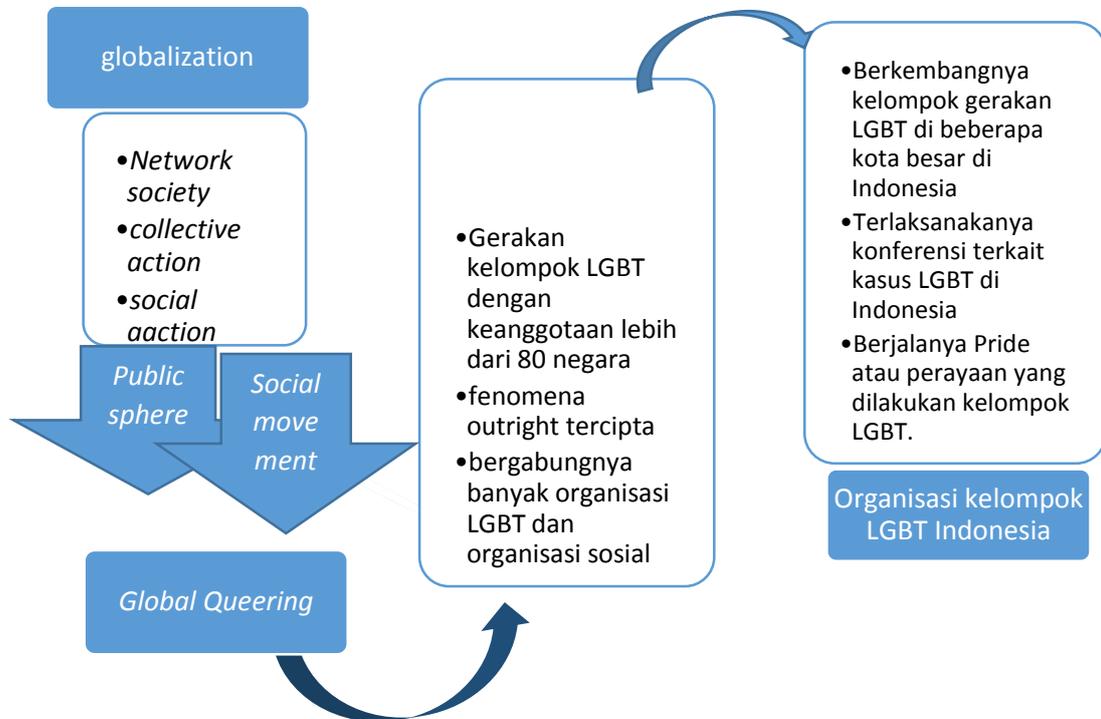
bahwa tindakan individu atau kelompok dipengaruhi oleh adanya 3 sistem, yaitu sistem sosial, sistem budaya dan sistem kepribadian setiap individu. Kita dapat mengaitkan individu dengan sistem sosialnya melalui status dan perannya. Dalam setiap sistem sosial individu menduduki suatu tempat atau status tertentu dan bertindak atau berperan sesuai dengan norma atau aturan yang dibuat oleh sistem tersebut dan perilaku individu ditentukan pula oleh tipe kepribadiannya.⁴⁵

Social action ini dapat dikaitkan dengan kelompok LGBT yang terus memperluas cakupan dan jumlahnya melalui adanya pengaruh dari beberapa pihak yang memiliki kesamaan dalam perbedaan orientasi seksual. Pengaruh yang hadir dari adanya peran media dan berbagai organisasi yang lain. Peran media dan pengaruh lain ini menjadikan motivasi dan penggerak dalam sekelompok aksi sosial dalam mencapai yang mereka inginkan.

⁴⁵ *Ibid. Hal 115*

1.6.Sintesa Pemikiran

Tabel 1.1 Sintesa Pemikiran



Berdasarkan skema yang telah dipaparkan di atas maka dijelaskan bahwa fenomena dalam era globalisasi, masyarakat lebih banyak mengonsumsi informasi dari media massa sehingga menciptakan perubahan pola pikir yang mendasari aksi kolektif dan aksi sosial. Aksi yang dilakukan secara kolektif diimplementasikan dengan adanya gerakan sosial dalam bentuk kelompok LGBT menjadikan fenomena *global queering* terbentuk dimana homoseksualitas menjadi global dalam cakupan yang luas. menurut Peter A. Jackson adanya kapitalisme dan pasar yang berpengaruh terhadap berbagai aspek dalam proses globalisasi memberikan pengaruh secara signifikan. Dalam perkembangan dan penyebaran budaya oleh kelompok homoseksual, globalisasi menjadi fasilitator dengan terhapusnya

batasan arus barang, manusia dan ide menjadikan masyarakat global saling berhubungan.⁴⁶

1.7. Hipotesis

Perkembangan kelompok LGBT di Indonesia didorong oleh perkembangan individu dengan kemajuan teknologi informasi yang menyediakan wadah dalam interaksi dan perkembangan sosial untuk menyatu dalam masyarakat dan lingkungan sehingga terciptanya *network society* yang menjadikan individu yang terlibat dalam perbedaan orientasi seksual mengambil langkah dalam menunjukkan keberadaannya melalui *collective action* yang selanjutnya terus berjalan dengan datangnya pengaruh-pengaruh dari media dan pandangan lain maka aksi tersebut berubah menjadi lebih berkembang dengan adanya *social action*. Aksi dalam masyarakat tersebut selanjutnya dapat di jelaskan dengan adanya *social movement*. Yang menjadikan kelompok LGBT terbentuk menjadi gerakan sosial sehingga menciptakan fenomena *global queering*. Pertukaran informasi dalam masyarakat ini yang selanjutnya menciptakan berbagai pandangan dan berkaitan dengan berbagai masalah yang tengah terjadi dan menjadi perhatian dalam masyarakat sehingga terciptalah pendapat umum yang membentuk kebijakan oleh suatu negara yang pada akhirnya akan menciptakan struktur masyarakat secara keseluruhan (*public sphere*).

⁴⁶Peter A. Jackson, "Capitalism and *Global Queering* National Markets, Parallels Among Sexual Cultures, and Multiple Queer Modernities," *A journal of lesbian and Gay studies* 15, No. 3 (2009) hal. 2

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Definisi Konseptual dan Operasional

1.8.1.1. *Social Movement*

Social movement menurut Anthony Giddens memiliki banyak bentuk dan cakupan.⁴⁷ Beberapa gerakan sosial memiliki kapasitas yang kecil dan sebagian memiliki cakupan yang sangat besar. Dengan keberagaman kapasitas yang ada di dalamnya, gerakan sosial seringkali berkaitan dengan aktifitas hukum dan protes gerakan sebuah protes. Meskipun gerakan sosial diartikan dengan gerakan protes, namun gerakan sosial berjalan sesuai peraturan dan norma yang berlaku dalam sebuah pemerintahan.⁴⁸

Menurut Anthony Giddens, gerakan sosial cenderung mengarah pada aktifitas penuntutan hak, menuntut kesetaraan yang biasanya berlaku dalam kaum perempuan. Gerakan sosial juga umumnya digunakan untuk menjalankan sebuah kampanye hak-hak kaum pekerja, juga fenomena sosial yang menyita banyak perhatian seperti aborsi dan penindasan terhadap kaum tertentu.⁴⁹ Dalam gerakan sosial, sekelompok masyarakat biasanya bertujuan untuk mencari alternatif perubahan dalam suatu peraturan pemerintahan terkait kesejahteraan masyarakat, seperti hak hak kaum buruh ataupun kelompok minoritas. Alternatif perubahan yang dimaksud adalah berubahnya ilegalitas menjadi suatu peraturan yang lain.⁵⁰

⁴⁷ Anthony Giddens, "Government and Politic : Globalization and social movement", dalam *Sociology*, 4th Ed. t.t. hal 439

⁴⁸ Anthony Giddens, "Government and Politic : Globalization and social movement", dalam *Sociology*, 4th Ed. t.t. hal 439

⁴⁹ *Ibid.* Hal 439

⁵⁰ *Ibid.* Hal 439

Dough McAdam menjelaskan bahwa Gerakan sosial adalah "usaha terorganisir, dari kelompok yang dikecualikan, untuk mempromosikan atau menolak perubahan dalam struktur masyarakat yang melibatkan jalan keluar ke bentuk partisipasi politik non-institusional."⁵¹ Dough McAdam juga menjelaskan gerakan sosial adalah kolektivitas yang bertindak secara kontinuitas untuk mempromosikan atau menolak perubahan dalam masyarakat atau organisasi yang menjadi bagiannya. Sebagai gerakan kolektivitas, sebuah gerakan mengharuskan kelompok dengan keanggotaan yang tidak terbatas dan bergerak ke arah kepemimpinan yang posisinya ditentukan oleh respons informal anggota daripada prosedur formal untuk melegitimasi sebuah kebijakan.⁵²

Definisi operasional dari *social movement* dalam pembahasan ini adalah dalam aktifitas sosial, *social movement* sering digunakan untuk pelaksanaan aktifitas penuntutan hak bagi masyarakat. Penuntutan hak dari beberapa kalangan seperti kaum pekerja dan warga sipil lainnya, *social movement* juga dikaitkan dengan adanya sebuah kampanye, kampanye yang dilakukan dalam suatu masyarakat bertujuan untuk perubahan dan pencapaian tujuan, yang diinginkan oleh masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari keberadaan kelompok LGBT di Indonesia yang menuntut hak dan mencoba menyuarakan keberadaan mereka melalui adanya kampanye.

⁵¹ Benitha Roth, "Select Definitions of social movement", 2001, <http://womhist.alexanderstreet.com/socm/definitions.htm>. (diakses 25 april 2017)

⁵² *Ibid.*

1.8.1.2. *Public Sphere*

Menurut Habermas, konsep *Public Sphere* diartikan sebagai suatu realitas kehidupan sosial.⁵³ Dalam konsep *public sphere* terdapat suatu proses pertukaran informasi yang selanjutnya menciptakan berbagai pandangan dan berkaitan dengan berbagai masalah yang tengah terjadi dan menjadi perhatian dalam masyarakat sehingga terciptalah pendapat umum. Dengan adanya pendapat umum maka dapat akan membentuk kebijakan oleh suatu negara yang pada akhirnya akan menciptakan struktur masyarakat secara keseluruhan. Adanya *Public Sphere* mendorong perilaku dan aksi dari masyarakat untuk memanfaatkan hak-haknya untuk ikut terlibat dalam suatu wacana permasalahan yang sedang berlangsung.⁵⁴

Sedangkan menurut Alan Mckee, *public sphere* memiliki beberapa pengertian yang dapat dikaitkan dengan berbagai fenomena sosial. Dengan adanya suatu pendapat umum, *public sphere* mampu menjadikan kepentingan masyarakat untuk lebih terlihat. *Public sphere* mampu menjadikan informasi yang tersebar dalam masyarakat untuk lebih tersalurkan. *Public sphere* juga mampu menjadikan masyarakat dalam suatu negara untuk mendiskusikan sebuah isu untuk menjangkau persetujuan atas kepentingan umum.⁵⁵

Wacana permasalahan yang sedang berlangsung dalam suatu masyarakat berkaitan dengan permasalahan politik, sosial dan ekonomi. Proses penyebaran wacana yang melahirkan opini publik dalam masyarakat ini tidak terlepas dari

⁵³ Jurgen Habermas dalam Anthony Giddens, "Mass Media and Communications : the public sphere", dalam *Sociology*, 4th Ed. t.t. hal 462

⁵⁴ Jurgen Habermas dalam Anthony Giddens, "Mass Media and Communications : the public sphere", dalam *Sociology*, 4th Ed. t.t. Hal 462

⁵⁵ Alan Mckee, *The Public Sphere: An Introduction*, (Cambridge University Press : 2005) hal: 6

adanya peran media masa. *Public sphere* juga mengutamakan adanya interaksi terhadap suatu masyarakat, interaksi yang dimaksudkan adalah suatu dialog yang tentunya juga melibatkan peran dari media.⁵⁶ Media memiliki sifat informing dengan menyebarkan informasi kepada masyarakat terkait kepentingan dan opini publik sehingga media massa merupakan bagian yang sangat penting dalam pembentukan masyarakat.⁵⁷

Definisi operasional dari *public sphere* ini adalah, dalam penyebaran informasi di dunia internasional, arus informasi menjadikan masyarakat lebih mengerti dan dapat menerima suatu kondisi yang sedang terjadi. Hal ini merujuk pada adanya pengaruh informasi dari media terhadap individu pemilik orientasi seksual yang berbeda sehingga muncul keinginan untuk menyuarakan haknya. Instrumen yang digunakan dalam pencapaian keinginan dilakukan melalui adanya gerakan sosial dengan cakupan masyarakat luas.

⁵⁶ *Ibid.* Hal 462

⁵⁷ *Ibid.* Hal 462

1.8.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian eksplanatif. Tipe penelitian eksplanatif menurut Ulber Silalahi bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara dua atau lebih suatu variabel yang memiliki suatu hubungan sebab akibat. Penelitian eksplanatif memiliki tiga tipe penjelasan yang berbeda diantaranya adalah *casual explanations* tipe yang menjelaskan hubungan merupakan sebuah sebab akibat. *Structural explanations* merupakan penjelasan tentang peran abstrak atau universal yang menggunakan teori fungsional dan pola dalam menjelaskan fenomena. *Interpretive explanation* yang bertujuan untuk membantu pemahaman, penjelasan yang dilakukan diantara dua atau lebih variabel, variabel mewakili segi kehidupan sosial yang bisa berubah seperti usia, jenis kelamin, ras dan kelas sosial.⁵⁸

1.8.3. Jangkauan Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam tulisan ini akan dibatasi dengan batasan tahun, tahun yang akan dibahas dimulai pada tahun 1980-an hingga pada tahun 2013. Pada tahun 1980 isu terhadap kelompok LGBT di Indonesia mulai berkembang, sedangkan pada tahun 2013 perkembangan kelompok LGBT di Indonesia mencapai kejayaannya dengan diangkatnya kesetaraan hak kelompok LGBT sebagai rencana pembahasan tahunan yang dilakukan oleh KOMNAS HAM di Indonesia.

⁵⁸ Ulber silalahi, *metode penelitian sosial*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009). Hal 30-32

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini Neuman menjelaskan bahwa peneliti setidaknya perlu menggunakan dua teknik pengumpulan data untuk melakukan penelitiannya, dua teknik tersebut dijelaskan dengan adanya Wawancara dan studi pustaka, wawancara bisa dilakukan untuk mendapatkan informasi dari sumber utama. Selain wawancara, Neuman juga menjelaskan bahwa data dari penelitian kualitatif dapat diperoleh dari studi Kepustakaan, Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Data ini diperoleh dengan mempelajari data yang bersumber dari peraturan tentang Pemerintah Kabupaten, literatur tentang tahap atau sistematika pembangunan, dokumen-dokumen kegiatan yang berkaitan dengan apa yang penulis teliti, yaitu dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip selanjutnya diklasifikasikan menurut bahasa masing-masing.⁵⁹

1.8.5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Data yang disajikan berbentuk teks dokumen serta catatan sebuah observasi terhadap suatu kasus yang telah dianalisis. Teknik ini digunakan karena data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan bukan rangkaian angka-angka juga tidak dapat disusun dalam kategori dan klasifikasi-klasifikasi.⁶⁰ Menurut King et al. Penelitian kualitatif tidak selalu eksplisit dalam artian, penelitian kualitatif memiliki makna

⁵⁹ W. Lawrence Neuman, *Metodologi Penelitian Sosial: Penekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. And ed. Edina T Sofia (PT.Indeks 2103) hal 566

⁶⁰ W. Lawrence Neuman, *Metodologi Penelitian Sosial: Penekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. And ed. Edina T Sofia (PT.Indeks 2103) hal 559

yang tersirat dari setiap bagian penelitian, selain itu penelitian kualitatif mendasari pernyataan dunia sosial. Analisis kualitatif terdiri dari tiga tahapan penulisan dalam melaksanakan penelitian sosial diantaranya: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.⁶¹

⁶¹ *Ibid.* Hal 560

1.8.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun dalam empat bab. Empat bab akan dijelaskan secara berurutan seperti berikut.

BAB I Merupakan metodologi penulisan penelitian yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Hipotesis, Metodologi Penelitian terdiri dari Definisi Konseptual Dan Operasional, Tipe Penelitian, Jangkauan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, serta Sistematika Penulisan.

BAB II merupakan data pendukung yang telah dikumpulkan. Dalam bab ini akan dijelaskan bagaimana fenomena *global queering* berkembang dan menyebarkan ideologinya secara global.

BAB III merupakan kumpulan data pendukung penelitian dan penjelasan. Kumpulan data yang akan dijelaskan adalah mengenai sejarah kelompok LGBT di Indonesia, bagaimana pandangan sosial, sejarah terbentuknya organisasi LGBT di Indonesia peran media dan sistem politik dalam mempengaruhi perkembangannya.

BAB IV adalah kesimpulan dari penelitian yang diperoleh dari penguraian masalah dan penjelasan dari Bab I, II dan Bab III.